

**Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam  
Pengelolaan Keuangan  
Oleh: Bayu Lesmana Taruna**

**Abstract**

*Regional autonomy has given birth to a system of regional governance mechanism that is more extensive than the previous system of government. These conditions cause in every local government has broader authority to manage the area, such as financial management.*

*In the area of financial management in accordance with the mechanisms of governance free from corruption, collusion and nepotism, the need for the principle of accountability is absolutely necessary. Accountability principles of our presence into the motor controller for fiduciary powers of local government in performing its obligations to manage local finance has been provided by the central government. Thus what had been feared that local governments will experience financial difficulties in managing the region itself is not going to happen, if the principle of accountability into the main capital for local government head.*

**Keywords:** *Autonomy, Accountability, Governance, Regional Finance, Constitutional Law, Administrative Law*

**Pendahuluan**

Saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan lebih menjamin kesejahteraan rakyatnya yakni keadilan dan kemakmuran. Hal ini merupakan cita-cita pemimpin daerah ketika terpilih jadi kepala daerah. Untuk mencapai tujuan keadilan dan kemakmuran daerah tersebut diperlukan suatu sistem dan usaha yang maksimal tidak hanya menciptakan sebuah konsep atau arah tujuan ke depan semata tanpa ada realisasinya. Tujuan pemerintahan daerah yang akan datang tentunya sudah dirumuskan tinggal bagaimana mewujudkan hal tersebut. Salah satu hal yang bisa mewujudkan tujuan

daerah yang akan datang adalah menyelenggarakan suatu pemerintahan daerah dengan asas transparansi yang lebih menjamin akuntabilitas publik.

Konsep transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah menjadi sangat penting diperlukan dalam mengelola suatu daerah. Bahkan konsep transparansi dan akuntabilitas publik merupakan hak asasi manusia yang harus diketahui oleh siapapun warga negara atau masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan hak dasar untuk mengetahui informasi tentang apa yang sementara